

Persatuan Indonesia yang Rawan

P.J. Suwarno

It is generally understood that to unite thousands of Indonesian island to be an integrated state under the sole control of the centralistic government in Jakarta is far from easy. Therefore, the solution is, the government should empower the unifying factors through three ways, first, the central government must provide enough telecommunication as well as transportation systems. Secondly, the government must enhance the level of readiness of the people to respect other people regardless with any reasons for discrimination. Thirdly, the government must make any efforts to gain economical justice among people.

Ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang menjadi modal pertama adalah semangat yang disebut nasionalisme. Memang ini yang dijadikan dasar pokok oleh Soekarno dalam membentuk Negara Indonesia merdeka. Ide dasar pertama yang diambil oleh Soekarno yaitu pengertian *nation* dari E. Renan yang memberi batasan bangsa sebagai sekelompok orang yang mempunyai keinginan bersama untuk bersatu dan tetap mempertahankan persatuan itu. Meskipun sesudah mendapat kritik dilengkapi dengan faktor geografis dari batasan Oto Bauer, namun ide pokok memang keinginan bersama untuk bersatu dan mempertahankan persatuan itu.

Jadi dari awal pembentukan negara Indonesia yang menjadi pokok pikiran pertama adalah bangsa yang nanti menjadi unsur warga negara dari Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17

Agustus 1945, sedangkan unsur-unsur lainnya seperti pemerintahan dan wilayah belum menjadi pemikiran utama. Baru setelah Belanda pergi dan Jepang kalah dalam Perang Dunia II mulai dipikirkan. Tentu saja masalah yang dipikirkan lebih dulu mengenai pemerintahan, memang pembentukan pemerintahan ini tidak begitu mudah, bahkan sampai sekarang bangsa Indonesia yang sudah merdeka ini belum berhasil membentuk pemerintahan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak rakyat yang menjadi pendukung dari negara Indonesia ini.

Kalau direnungkan kembali, bangsa Indonesia ini belum pernah memiliki pemerintahan yang sungguh-sungguh dikehendaki rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat secara stabil, tetapi masih untuk kelompok tertentu, bahkan kadang-kadang tidak menghiraukan kepentingan rakyat. Hal ini tampak dari sejarah pembentukan pemerintah nasional Indonesia dari tahun

1945 sampai sekarang. Pada awal berdirinya Negara Indonesia Presiden Soekarno dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta merupakan pemerintahan yang tidak diawasi oleh badan lain, maka ada kekawatiran negara-negara lain terutama negara Barat dan Amerika Serikat akan menuduh Negara Indonesia sebagai negara boneka Jepang yang baru saja meninggalkan Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Oktober dan 14 November 1945 diaturlah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan legislatif yang menerima pertanggungjawaban pemerintah, sedang pemerintah diserahkan kepada kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden hanya sebagai kepala negara saja, tidak bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Hal ini berjalan sampai tahun 1949, sedangkan rakyat belum sempat dilibatkan dalam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakilnya secara jujur, karena pihak Belanda menganggap setelah Jepang pergi Indonesia kembali menjadi jajahannya lagi seperti sebelum tanggal 8 Maret 1942. Belanda berusaha memerintah kembali Indonesia dengan datang ke Indonesia memboncong Inggris yang ditugaskan oleh Sekutu untuk memulangkan tentara Jepang ke negeri Jepang.

Akibat dari situasi yang demikian, bentrokan dengan Pemerintah Indonesia yang sudah memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat dihindarkan. Pemerintahan Sjahrir yang berusaha meyakinkan Belanda dengan diplomasinya tidak berhasil mempengaruhi Belanda untuk mengakui kedaulatan RI atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Kecuali perundingan yang diadakan di Linggarjati dan Renville perang gerilya berjalan terus sampai tahun 1949. Pada

tahun itu Belanda sudah berhasil membentuk 15 negara bagian di Indonesia, maka dia mengusulkan agar 15 negara bagian itu bersama dengan Negara Kesatuan RI membentuk satu negara federal. Hal ini dapat disepakati dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag selesai pada tanggal 2 November 1949.

Dengan menyepakati pembentukan Negara Federal, dan kemudian menarik tentaranya dari Indonesia tersebut, Belanda mengharapkan dapat menguasai Indonesia lewat kepala-kepala negara bagian tersebut. Sebaliknya negara bagian RI sebelum KMB sudah mengumpulkan wakil-wakil dari negara-negara bagian itu dalam dua kali konferensi dan menghasilkan kesepakatan bahwa kalau Belanda sudah meninggalkan Indonesia, negara-negara bagian tersebut akan melepaskan diri dari pihak Belanda dan berdiri sebagai negara merdeka. Hal ini terlaksana, sebab RIS hanya berumur kurang dari satu tahun, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 sudah menyatakan diri berubah menjadi Negara Kesatuan RI dengan Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Belanda tidak bereaksi keras, hanya Irian Barat tetap dikuasainya. Irian Barat dapat kembali ke Indonesia setelah diadakan Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 yang diikuti penyerbuan terhadap Irian Barat yang baru berakhir pada tanggal 15 Agustus 1962, sebab sudah tercapai persetujuan antara Pemerintah RI dan Belanda di markas PBB. Akhirnya pada tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat diserahkan kepada RI.

Peristiwa di Aceh

Peristiwa menyatunya Irian Barat

dengan Indonesia ini agak berbeda dengan persatuan Aceh dengan Indonesia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Aceh dibawah pimpinan para ulama mendukung Proklamasi Kemerdekaan RI, telah ada konflik antara Ulama dengan *Uleebalang*, tetapi kelompok Ulama tetap memegang kekuasaan politik dan pemerintahan. Mula-mula kelompok-kelompok ulama bergabung dalam suatu organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang didirikan oleh Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap pada tanggal 8 Mei 1939. Meskipun semula dimaklumkan bahwa tidak akan bergerak dalam bidang politik, tetapi waktu Jepang menduduki Aceh sudah tujuh Ulama yang diangkat menjadi *Atjeh-shu-sangi-kai* (semacam Dewan Rakyat Atjeh). Demikian juga dalam waktu Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, para ulama banyak yang tampil memimpin rakyat baik di desa mauppun di kota.

Pada tahun 1950 Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang menghapus Propinsi Aceh. Akhirnya berkobarlah pemberontakan Aceh pada tanggal 21 September 1953 dibawah pimpinan Daud Berueh, yang berlangsung sampai tahun 1959, hingga keluarnya SK Perdana Menteri No. 1/Missi/1959 yang menyatakan bahwa Aceh menjadi Daerah Istimewa di dalam lingkungan RI. Demikianlah keadaan Aceh sampai Pemerintah pusat beralih ke tangan Orde Baru, Aceh pun dapat dimasuki Golkar juga, meskipun dalam pemilihan umum selalu ditandingi oleh PPP, yang biasanya *fifty-fifty*. Namun penguasaan Orde Baru yang banyak mengeksploitasi Aceh dan banyak menggunakan kekuatan militer

untuk menekan kehendak rakyat itu sekitar tahun 1976 muncul sekelompok profesional yang mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan mencari bantuan pada ulama-ulama yang pernah mengadakan gerakan pada tahun 1950-an. GAM ini mulai bergerak tahun 1977, tetapi pada bulan Mei sudah dihantam oleh tentara Pemerintah, sehingga menjadi gerakan di bawah tanah. Gerakan ini dipimpin oleh Hasan Tiro seorang pedagang Aceh yang pernah tinggal di USA. Hasan Tiro mengaku sebagai keturunan dari Teungku Cik Di Tiro, yang pernah menjadi pahlawan perang melawan Belanda. Hasan Tiro inilah yang memproklamasikan Aceh merdeka pada tahun 1976 waktu didirikan GAM tersebut.

Pihak Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 1979 telah menumpas GAM, tetapi Hasan Tiro bangkit lagi dan menyatakan Front Pembebasan Nasional Aceh yang dinyatakan bangkit lagi pada tahun 1989 atau awal 1990. Dia mengorganisasi orang Aceh yang tidak puas terutama petani miskin, membiayai gerakannya dengan produksi mariyuana, mengumpulkan buruh miskin Aceh yang disaingi oleh buruh-buruh yang masuk dari luar Aceh, meskipun intinya tetap orang-orang profesional yang dulu membentuk GAM.

Oleh karena GAM mempunyai hubungan dengan dunia internasional akhirnya Pemerintah RI mau mengadakan perundingan dengan GAM di Geneva, Swiss. Pada tanggal 9 Desember 2002 disepakati penghentian permusuhan antara GAM dan TNI yang ditandatangani oleh Utusan Indonesia Wirjono Sastrohandoyo dan pihak GAM yang diwakili oleh dr. Zaini Abdullah. Dikatakan ini baru merupakan awal dari perdamaian itu dan nanti untuk selanjutnya akan diirundingkan lebih lanjut.

Kecuali Aceh di Irian yang sekarang disebut Papua juga terjadi gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, namun kalau diingat sejarahnya, sebenarnya masalahnya bagaimana Pemerintah Pusat memperlakukan daerah-daerah itu dalam mengurus kepentingannya sendiri, dengan kata lain bagaimana asas desentralisasi itu sungguh-sungguh dilaksanakan. Kalau dilihat dari perkembangannya bergabungnya Aceh dan Papua dengan Indonesia tidak begitu mudah, dalam arti ada usaha yang cukup kuat dari tokoh-tokoh Aceh dan Papua dalam mendorong rakyatnya bergabung dengan Indonesia daripada berdiri sendiri. Jadi kalau Pemerintah Pusat sungguh-sungguh memberi otonomi seluas-luasnya ke daerah-daerah itu, tentu akan tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan yang besar seperti yang dicita-citakan oleh para proklamator.

Memang wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau ini sulit sekali untuk dirangkul menjadi negara kesatuan dengan satu pemerintah pusat, di Jakarta. Konsekuensinya Pemerintah Indonesia harus berusaha memperkuat faktor-faktor persatuan itu. Pertama, Pemerintah harus membangun sarana komunikasi yang lancar ke seluruh penjuru tanah air Indonesia. Komunikasi ini dapat berupa hubungan telepon, jalan darat dan laut. Di samping itu, lewat pendidikan Pemerintah harus membangun keterbukaan setiap warga negara Indonesia untuk menerima sesama warga negara lain tanpa diskriminasi dalam bidang apapun. Dengan demikian harus diusahakan kehidupan sosial yang setara untuk semua warga negara untuk menuju pada kesetaraan kultural. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya mengusahakan kesetaraan kehidupan ekonomis, yang akhir-akhir ini sangat mengganggu

integrasi bangsa yang sangat dibutuhkan justru dalam menghadapi kehidupan yang semakin keras dalam persaingan global yang niscaya sekarang ini.

Jadi persatuan Indonesia akan tetap kuat dan bertahan kalau setiap suku bangsa yang jumlahnya ratusan itu merasa dapat menikmati kebebasan dalam mengembangkan dirinya masing-masing baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok dan Pemerintah Pusat siap memfasilitasi komunikasi antar individu antar kelompok suku dan seluruh bangsa dengan mengembangkan pendidikan, pengadilan, hubungan yang menguntungkan dengan luar negeri. Berkaitan dengan ini banyak yang harus diurus oleh Pemerintah pusat terutama dengan perbatasan wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara asing.

Pembentukan Negara Federal

Untuk mewujudkan gagasan tersebut sebenarnya bentuk negara yang paling tepat yaitu negara federal dengan propinsi-propinsi sebagai negara bagian. Akan tetapi bentuk negara kesatuan merupakan semacam ideologi bangsa Indonesia, hal ini akan menimbulkan luka pada perasaan perjuangan Indonesia, kalau diganti dengan bentuk negara serikat atau negara federal. Ketika para tokoh politik pernah membuka diskusi tentang bentuk negara federal ini mendapat reaksi keras terutama dari tokoh-tokoh yang mengalami perjuangan menegakkan Negara RI dari ancaman penjajahan Belanda pada awal-awal kemerdekaan, Kecuali itu rupanya usaha Belanda membentuk negara federal yaitu RIS yang dimaksudkan untuk mencoba menguasai lagi Indonesia menjadi kenangan yang pahit,

sehingga menolak mentah-mentah bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

Oleh karena itu, bentuk negara kesatuan dipertahankan dengan otonomi seluas-luasnya. Namun, mungkin otonomi itu digeser ke propinsi, Kalau hal ini berhasil, maka langkah ke bentuk negara federal sebenarnya sudah tidak jauh lagi, tinggal memperkuat otonomi masing-masing propinsi. Memang untuk sementara tidak dapat dilaksanakan secara ketat, sebab banyak propinsi yang masih tergantung pada propinsi lain, hal itu tidak menjadi masalah Pemerintah Pusat mengatur agar perpindahan warga negara Indonesia dari propinsi satu ke propinsi lain tidak dipersulit, tetapi justru diperlancar antara lain dengan pembangunan komunikasi terutama transportasi seperti telah disebut di atas.

Kalau otonomi menjadi seluas otonomi Aceh dan Papua nanti akan memberi ruang bergerak pada orang-orang yang ingin menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya, minimal mengurangi bentrokan yang penyebabnya diboncengkan pada perbedaan agama. Memang dasar negara tetap Pancasila yang mewadahi semua perbedaan agama, adat istiadat yang berkemanusiaan, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun untuk dapat menjadikan ideologi itu suatu kenyataan yang real perlu usaha dan waktu. Usaha yang paling strategis adalah pendidikan baik yang bersifat sekolah maupun pendidikan yang berupa kursus-kursus yang diusahakan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Kecuali itu kegiatan budaya, baik yang mempertahankan budaya yang sudah dimiliki masyarakat secara tradisional maupun pengembangan kreativitas dalam bidang budaya, sehingga

dapat muncul budaya modern yang memiliki sifat-sifat nasional, bahkan internasional.

Dalam bidang pengembangan budaya, kiranya Indonesia merupakan lahan yang sangat potensial untuk digarap, sebagai misal pusat-pusat latihan tari seperti yang didirikan di Yogyakarta, kiranya dapat dikembangkan di daerah-daerah lain sesuai dengan potensi seni tari yang dimiliki masing-masing daerah di Indonesia. Kalau hal ini dapat dirangsang dan dihidupkan tentu Indonesia akan menjadi pusat berkembangnya kreasi tari kontemporer yang mempunyai keaneka ragaman yang tidak tertandingi oleh negara manapun. Namun semuanya itu mempunyai corak umum keindonesiaan.

Masalah Agama

Mungkin yang perlu dipikirkan di Indonesia ini adalah masalah agama. Memang agama yang diakui oleh Pemerintah terdiri atas agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Agama Hindu, dan agama Buddha. Meskipun demikian juga masih ditolerir adanya Kepercayaan yang penganutnya tidak sedikit, bahkan pernah ada kasus yang berkaitan dengan orang yang menganut faham Confucianisme yang mengadakan perkawinan sesuai dengan keyakinannya itu sampai ke pengadilan negeri. Sebenarnya kalau dikembalikan kepada sila pertama dari Pancasila yang berkemanusiaan, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan dan berkeadilan sosial, kiranya tidak akan timbul masalah yang rumit. Jadi memang Pancasila dirumuskan secara abstrak maksudnya agar dapat mewadahi semua keaneka ragaman yang ada di Indonesia dan mencegah konflik antara satu dengan yang lain. Kalau

hal ini disadari dan diartikan dengan pemikiran yang luas kiranya akan banyak hal yang menimbulkan konflik, bahkan tindakan teror itu akan dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya.

Memang dengan dasar Pancasila yang juga diikuti semboyan Bhineka Tunggal Ika itu maksudnya agar yang berbeda-beda ini bersatu adanya. Usaha selanjutnya yaitu meneliti perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Untuk meniadakan atau menghindarkan perbedaan yang sifatnya bertentangan saling mematikan dan menumbuhkembangkan perbedaan yang sifatnya saling melengkapi. Perbedaan yang pertama sedapat mungkin di-tiadakan atau ditahankan dalam lingkungan sendiri, sedangkan perbedaan yang kedua dikembangkan seluas-luasnya. Kalau prinsip ini dapat dilaksanakan dalam kehidupan yang real, tentu persatuan Indonesia akan kokoh kuat, dan tidak rawan lagi. Dengan demikian kita bisa memusatkan semua potensi untuk membangun Indonesia yang kaya raya secara alami ini sungguh-sungguh untuk kepentingan warga negara Indonesia secara keseluruhan.●

Daftar Pustaka

- Birch, Anthony H. 1989. *Nationalism and National Indtegration*, Unwin Hyman, London, Sydney, Wellington.
- Brown, David. 1994. *The State and Ethnic Politics in South-East Asia*, Routledge, London and New York.
- Kahin, George Mc Turnan. 1970. *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Pres, Ithaca and London.
- Marwati Djoened Pusponegoro, Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Suwarno. 1994. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Yamin, Muhammad, Penghimpun. 1959. *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Prapantja, Djakarta.

